

Pembangunan ZI menuju WBK Biro Kesekretariatan Pimpinan 16 Mei 2025

SOSIALISASI PENGELOLAAN

**KONFLIK KEPENTINGAN**

**DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Draft Persekjen DPR-RI - PermenPAN RB No 17 Tahun 2024

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA  
Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu

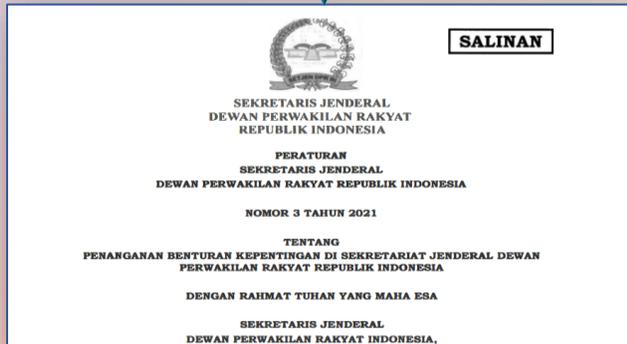


INSPEKTORAT UTAMA

# REGULASI

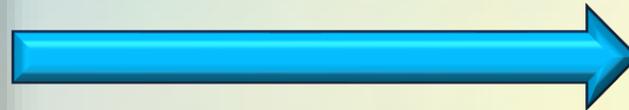


PerMenPAN RB NO. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

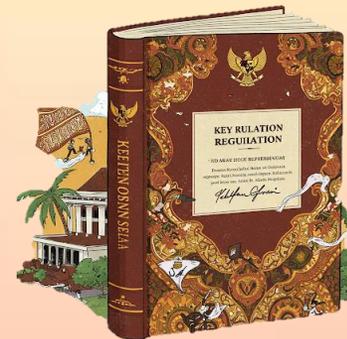


Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor 3 tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Setjen DPR-RI

15/05/2025



PerMenPAN RB No 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan



**DRAFT PERATURAN SEKJEN DPR-RI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN**  
Paling lambat 6 bulan sejak 31 Oktober 2024

# DEFINISI

## PermenPAN RB 37 Tahun 2012

**Benturan kepentingan** adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki **kepentingan** pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.



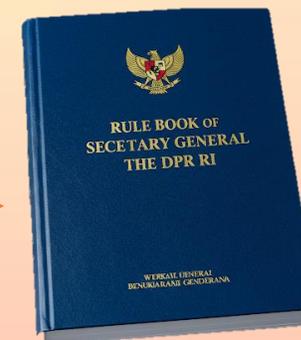
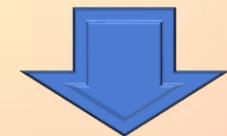
## Persekjen 03 Tahun 2021

Benturan Kepentingan adalah kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pegawai dalam mengemban tugas.



## PermenPAN RB 17 Tahun 2024

**Konflik Kepentingan** adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.



## Persekjen .... Tahun 2025

**Pedoman Pengelolaan  
Konflik Kepentingan**

# TUJUAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

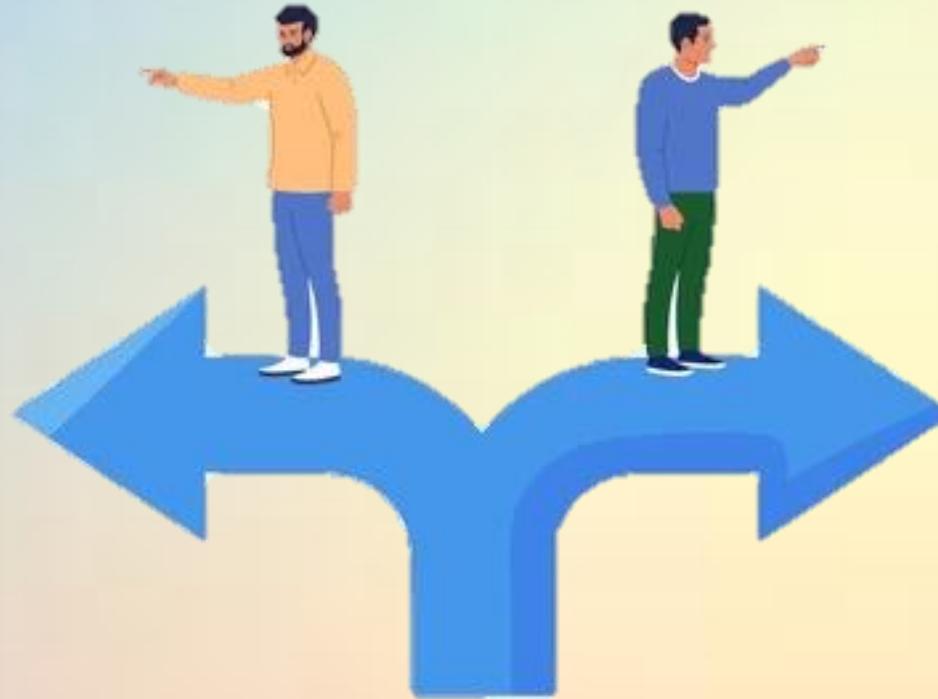


1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan
3. Memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Instansi Pemerintah dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan
4. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat Pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan
5. Memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas
6. Mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Instansi Pemerintah.

# JENIS KONFLIK KEPENTINGAN

## AKTUAL

Kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.



Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas **Konflik Kepentingan Aktual**, dan **Konflik Kepentingan Potensial**.

## POTENSIAL

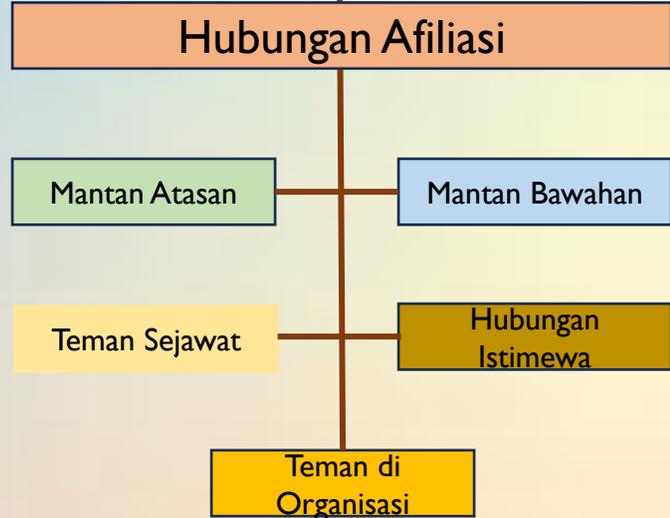
kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

# SUMBER DAN BENTUK



# HUBUNGAN KELUARGA, AFILIASI, RELASI, DAN SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN LAINNYA

PEJABAT  
PEMERINTAHAN  
TERTEUTU



## Bentuk Sumber Konflik Kepentingan lainnya

1. Menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
2. Di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya
3. Memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
4. Menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya
5. Memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi
6. Melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KONFLIK KEPENTINGAN YANG BERSUMBER DARI KELUARGA DAN KERABAT

Hubungan keluarga dan kerabat menyebabkan terjadinya Konflik Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pemerintah tertentu



**Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (revolving door)**  
Dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat Pemerintahan kepada mantan Pejabat Pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan Pejabat Pemerintahan saat ini bekerja.

# PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN



1. Pembangunan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan
2. Pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan
3. Pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi
4. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

# PEMBANGUNAN SISTEM



## Petunjuk teknis tatacara Pengelolaan Konflik Kepentingan

1. Proses teknis pengelolaan Konflik Kepentingan
2. Proses Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
3. Prosedur dan mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan
4. Tatacara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal

## Bentuk komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan Instansi

1. Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan
2. Pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan
3. Pembentukan Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (PPPKK).



1. Menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan
2. Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan memiliki SDM yang kompetensi dan sesuai kualifikasi
3. Sosialisasi komitmen dan peraturan mengenai pengelolaan Konflik Kepentingan.



## Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Internal

1. Melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
2. Memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi
3. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal

# PELAKSANAAN SISTEM



1. Pencatatan daftar kepentingan pribadi (Wajib 1 tahun sekali dimuat di IT)
2. Deklarasi Konflik Kepentingan
3. Pengendalian Konflik Kepentingan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan
4. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu (*cooling of period*) mantan Pejabat Pemerintah
5. Pelatihan dan konsultasi

## PENCATATAN

1. Identitas diri
2. Jabatan dan unit kerja
3. Daftar keluarga dan kerabat
4. Daftar kepemilikan saham di atas 1%, aset kepemilikan aset atau investasi dengan nilai di atas Rp.500 juta rupiah, pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis
5. Pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok
6. Jabatan publik lain yang sedang diemban
7. Afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis
8. Rencana kerja pasca pensiun yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 hari sebelum masa pensiun

## DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

1. Identitas diri
2. Jabatan dan unit kerja
3. Penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan.
4. Penjelasan kaitan sumber Konflik Kepentingan dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan
5. Pengendalian Konflik Kepentingan

## PENGENDALIAN

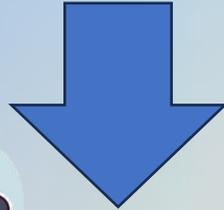
Analisis Konflik Kepentingan berdasarkan Deklarasi Konflik Kepentingan, memeriksa, dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

## PENGENDALIAN DENGAN MASA TUNGGU

Masa tunggu (*cooling off period*) 2 (dua) tahun setelah Pejabat Pemerintah Tertentu berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya dilarang mengambil keputusan atau tindakan administrasi yang menguntungkan mantan pejabat. (misalnya perijinan, PBJ, pengawasan, konsultasi)

## PELATIHAN DAN KONSULTASI

Pelatihan pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan bagi Calon pegawai ASN pada pelatihan dasar dan Pejabat Pemerintah Tertentu pada pelatihan kepemimpinan. Konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan difasilitasi oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan setiap Instansi Pemerintah



### Atasan Pejabat Menganalisis Deklarasi

Memeriksa dan meneliti Konflik Kepentingan yang dideklarasikan serta dampak dan kemungkinannya mempengaruhi netralitas Pengambilan Keputusan/Tindakan

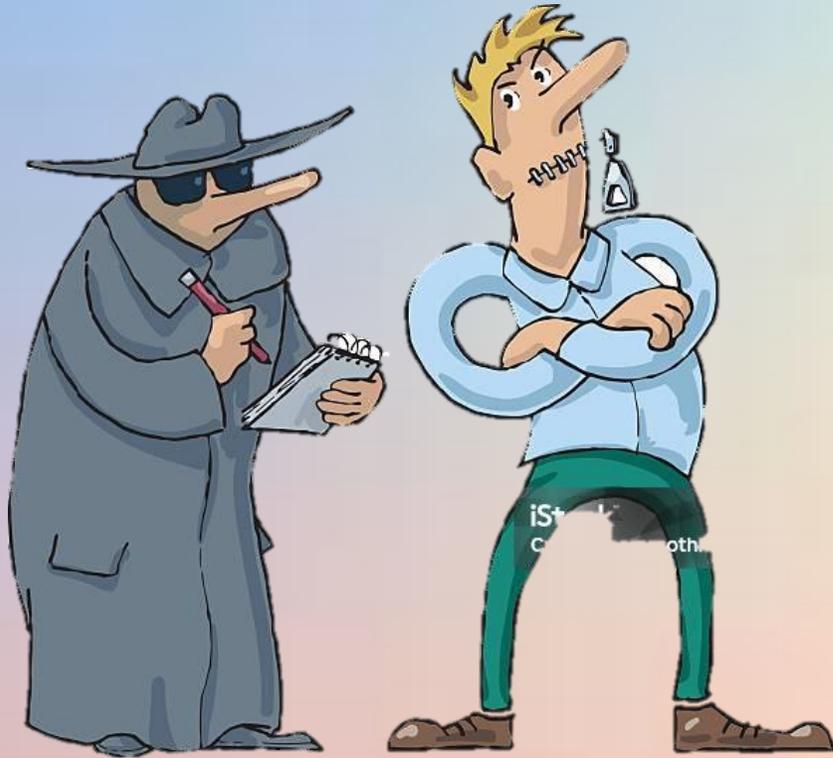
Bukan konflik kepentingan atau ada konflik kepentingan dianggap tidak berdampak besar akan mempengaruhi netralitas pengambilan Keputusan/Tindakan

1. Membolehkan Pejabat mengambil Keputusan/Tindakan
2. Membolehkan Pejabat mengambil Keputusan/Tindakan dengan membatasi Sebagian akses/kewenangan

Terdapat konflik kepentingan yang berdampak besar pada netralitas pengambilan Keputusan/Tindakan

1. Atasan Pejabat mengambil alih pembuatan Keputusan/tindakan, dan
2. Menyarankan pengendalian konflik kepentingan lain

# PENGAWASAN



Pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui:

1. **Pengawasan Langsung** atasan pejabat kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu.
2. **Pengaduan.**

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyediakan mekanisme pengaduan, yang dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan aduan yang telah ada di Instansi Pemerintah

# MONITORING DAN EVALUASI



Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik kepentingan dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan secara berkala paling sedikit sekali I (satu) tahun.

Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui sistem teknologi informasi yang disediakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

## LAPORAN MONEV

1. Ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis dengan Peraturan Menteri
2. Ketersediaan Pejabat Pelaksana
3. Ketersediaan identifikasi dan Manajemen Risiko; Capaian dan Tantangan
4. Kepatuhan mencatatkan Daftar Kepentingan Pribadi, Mendeklarasikan, dan Tindak Lanjut Deklarasi.
5. Pelaksanaan Pelatihan dan Konsultasi
6. Tindak Lanjut Pengaduan

# APRESIASI



Apresiasi diberikan kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu dan Instansi Pemerintah yang telah memberikan contoh baik serta berperan proaktif dalam upaya melaksanakan atau mendukung pengelolaan Konflik Kepentingan.

1. Bagian penilaian capaian reformasi birokrasi kepada Instansi Pemerintah; dan
2. Bagian capaian kinerja kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu.

# RISIKO

Pada dasarnya semua jabatan dimana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan Jabatan memiliki risiko Konflik Kepentingan. Namun demikian, ada jabatan-jabatan tertentu dimana risiko tersebut lebih besar:



1. Perencanaan
2. Pembuatan Aturan dan Kebijakan
3. Pengadaan Barang dan Jasa
4. Perizinan
5. Pengangkatan, Promosi, Mutasi dan Kebijakan Manajemen SDM
6. Pengawasan dan Pemeriksaan
7. Penilaian, termasuk Sertifikasi dan Pengujian
8. Penyelidikan dan Penyidikan
9. Penuntutan; atau
10. Pengadministrasian Perkara di Pengadilan.



# DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

<b>A. Hubungan Keluarga dan Kerabat</b>				
<i>Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.</i>				
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

<b>B. Hubungan Bisnis dan Finansial</b>				
<i>Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.</i>				
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai / Prosentase	Nama Badan Usaha / Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

<b>C. Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok</b>				
<i>Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.</i>				
No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan / Fungsi	Nama Perusahaan/ Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

<b>D. Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)</b>			
<i>Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban</i>			
No.	Jabatan	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

<b>E. Hubungan atau Afiliasi Lainnya</b>			
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak



# DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

	Jika iya, sebutkan  Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :				
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, reboas hobi atau organisasi sejenisnya? <table border="1"><tr><td>Ya</td><td>Tidak</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Ya	Tidak		
Ya	Tidak				
	Jika iya, sebutkan  Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :				
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki? <table border="1"><tr><td>Ya</td><td>Tidak</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Ya	Tidak		
Ya	Tidak				
	Jika iya, sebutkan  Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :				

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengundurkan diri				
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki? <table border="1"><tr><td>Ya</td><td>Tidak</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Ya	Tidak		
Ya	Tidak				
	Jika iya, uraikan rencana anda:  Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: SetyantaNugraha Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:				

	Nama organisasi yang akan terlibat aktif Posisi/Jabatan Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:
--	---

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil keputusan dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)



# DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

## Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,

Nama Atasan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi  
.....  
.....
2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki  
.....  
.....
3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan  
.....  
.....
4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)

.....  
.....  
.....

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggungjawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

*(tempat, tanggal, bulan, tahun)*

Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

*(nama lengkap)*

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI



Banyak yang salah jalan  
tapi merasa tenang  
karena banyak teman  
yang sama-sama salah.

Beraniilah  
menjadi BENAR,  
meskipun sendirian.

--Baharuddin Lopa--



Kurang cerdas dapat diperbaiki  
dengan belajar.

Kurang cakap dapat dihilangkan  
dengan pengalaman.

Namun tidak jujur  
itu sulit diperbaiki

Bung Hatta



merdeka.com

@merdekadotcom

www.facebook.com/MDK.com

@merdekadotcom

**BIASAKAN YANG BENAR**  
**BUKAN**  
**MEMBENARKAN YANG BIASA**